Faktor-faktor yang mempengaruhi Penanaman Modal Asing Di Jawa Tengah Tahun 2000-2017

JURNAL

Oleh :

Nama : Agung Rinaldi Sulaksono

Nomor Mahasiswa : 14313176

Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA

2018

FACTORS AFFECTING FOREIGN INVESTMENT IN CENTRAL JAVA 2000-2017

Agung Rinaldi Sulaksono

Economics, Faculty of Economics, Islamic University of Indonesia

Agung_rinaldi@ymail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the long and short term that occur between variables related to foreign investment in the province of Central Java during the period 2000-2017. The method used in this research is Error Correction Model (ECM). ECM analysis results show that in the long run Libor and UMP have a significant relationship to foreign investment in Central Java, while Inflation and Infrastructure are not significant to foreign investment in Central Java in the long run. In the short term inflation, infrastructure, and Libor have a significant relationship to foreign investment in Central Java, while the Provincial Minimum Wage in the short term is not significant to foreign investment in Central Java.

Keywords: *Foreign Investment, Inflation, Infrastructure, Libor, UMP, and ECM*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang harus mempunyai tujuan untuk mengejar ketertinggalan dari segala hal dengan melakukan pembangunan di segala bidang, dalam hal ini tentu memerlukan pembiayaan yang cukup besar untuk membangun perekonomian yang merata dan sejahtera bagi rakyatnya. Indonesia belum mampu untuk menyediakan seluruh dana pembangunan tersebut salah satu penyebabnya adalah besarnya tabungan domestik masih kurang memenuhi investasi yang dibutuhkan. Sebagai mana yang disebutkan oleh Sri Sumarni (2007) kesenjangan antara tabungan domestik dan kebutuhan investasi (saving investment gap) yang diperlukan dalam mencapai satu tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu, mengharuskan pemerintah untuk mencari alternatif sumber pembiayaan lain. Oleh karena itu, pemerintah selain menggali sumber pembiayaan dalam negeri juga melakukan kebijakan dalam mendapatkan sumber-sumber dana dari luar negeri, diantaranya adalah pinjaman luar negeri, penanaman modal asing, dan hibah.

Langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah terus berupaya mencari sumber sumber pembiayaan baru bagi pembangunan baik yang berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri. Salah satu cara yang dapat ditempuh dalam pemenuhan kebutuhan akan investasi adalah dengan penanaman modal asing. Untuk negara-negara yang belum maju seperti Indonesia, penanaman modal asing memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan pinjaman komersil untuk pembiayaan pembangunan. Penanaman modal asing merupakan salah satu sumber dana dan jasa pembangunan di negara sedang berkembang berkait sifat khususnya berupa paket modal, teknologi dan keahlian

manajemen yang selektif serta pemanfaatannya dapat disinkronkan dengan tahapan pembangunan negara yang bersangkutan (Sumantoro, 1984:9).

Dalam hal ini pemerintah dapat mengupayakan sumber dana dari luar negeri dengan investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) dan investasi asing portofolio yaitu penanaman modal oleh pihak asing yang masuk kedalam pasar modal Indonesia. Sarwedi (2002) menyatakan bahwa sumber pembiayaan yang berasal dari penanaman modal asing langsung atau foreign direct investment (FDI) merupakan pembiayaan luar negeri yang paling potensial dibandingkan dengan sumber pembiayaan luar negeri lainnya. FDI lebih penting dalam menjamin keberlangsungan pembangunan jangka panjang dibandingkan dengan aliran bantuan atau modal portofolio.

Pada masa krisis ekonomi yang mengguncang Indonesia pada tahun 1997-1998, perekonomian Indonesia sudah kembali menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi yang positif pada tahun berikutnya yaitu tahun 1999, namun hingga saat ini pertumbuhan rata-rata per tahun relatif masih lambat dibandingkan negara-negara tetangga yang juga terkena krisis seperti Korea Selatan dan Thailand, atau masih jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan rata-rata per tahun yang pernah dicapai oleh pemerintahan Orde Baru, khususnya pada periode 1980-an hingga pertengahan 1990-an. Menurut Tulus Tambunan (2006) salah satu penyebabnya adalah masih belum intensifnya kegiatan investasi, termasuk arus investasi dari luar terutama dalam bentuk penanaman modal asing langsung. Padahal pada era Orde Baru membuktikan bahwa investasi, khususnya investasi asing langsung, merupakan faktor pendorong yang sangat krusial bagi pencapaian pertumbuhan

ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Terutama melihat kenyataan bahwa sumber perkembangan teknologi, perubahan struktural, diversifikasi produk, dan pertumbuhan ekspor di Indonesia selama Orde Baru sebagian besar karena kehadiran investasi asing langsung di Indonesia.

Pasca kejatuhan rezim orde baru, Indonesia mengalami kontrkasi domestik. Semangat reformasi dan pembaharuan melahirkan koreksi menyeluruh terhadap system tata negara orde baru yang bersifat otoriter dan represif. Berbagai aturan dan formulasi ditawarkan dalam membenahi ketimpangan-ketimpangan yang terjadi selama kurang lebih 32 tahun. Salah satunya adalah dibuatnya Undang-undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999 yang lebih dikenal dengan undan-undang otonomi daerah untuk mengembalikan semangat Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 yang telah meletakkan dasar-dassar system hubungan pusat dan daerah dengan prinsip-prinsip desentralisasi, dekonstrasi dan tujuan pembantuan yang di masa orde baru terabaikan implementasinya. Namun dalam kurun waktu lima tahun pasca undang-undang ini ditetapkan, hasilnya dinilai tidak efektif sehingga memaksakan penggodokan ulang terhadap undang-undang ini dan akhirnya melahirkan undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang tentang otonomi daerah berupaya membangun daerahnya dengan mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini juga menjadikan sebab investasi bagi suatu provinsi sangat penting karena dapat memicu pertumbuhan ekonomi, serta dapat menumbuhkan potensi-potensi yang ada di daerah tersebut sehingga dapat menarik investor dalam negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi. Jawa Tengah memiliki potensi yang sangat besar dalam

bidang investasi antara lain potensi pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, industri, pertambangan, jasa dan pariwisata.

Realisasi laju PMA di Jawa Tengah.

Tahun	PMA(USD)
2000	163,599,00
2001	66,847,00
2002	73,435,00
2003	60,680,29
2004	504,630,00
2005	550,512,44
2006	381,668,71
2007	317,165,10
2008	39,488,86
2009	101,433,75
2010	88,293,48
2011	173,979,71
2012	141,823,06
2013	342,351,00
2014	248,693,00
2015	231,837,548
2016	124,312,00
2017	103,079,590

Sumber : *Badan Pusat Statistik Jawa Tengah*

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat besarnya laju pertumbuhan realisasi Penanaman Modal Asing di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2000-2017 mengalami fluktuatif, dengan kecenderungan yang menurun. Kenaikan yang cukup tinggi yaitu pada tahun 2004-2005 merupakan puncak tertinggi dari pertumbuhan realisasi penanaman modal asing yang masuk ke provinsi Jawa Tengah, hal ini didasarkan adanya kepercayaan dari investor asing sehingga pada tahun 2004-2005 laju pertumbuhan investasi asing mengalami kenaikan, dan penurunan yang cukup signifikan yaitu dapa tahun 2008, penurunan yang terjadi pada periode tersebut

dikarenakan belum berjalannya dengan baik sistem *one stop service* dan juga penurunan pada tahun 2008 sebesar -87,55% dipengaruhi oleh krisis global yang terjadi efeknya juga masih terasa hingga tahun 2009, namun tahun berikutnya investasi mengalami peningkatan kembali karena kondisi perbankan di Indonesia yang kuat sehingga perekonomian serta investasi dapat kembali stabil. Investasi pada tahun 2012 dan 2013 kembali mengalami penurunan masing-masing sebesar -79,61% pada tahun 2012 dan -14,37 pada tahun 2013. Dan pada tahun 2014-2017 dalam kurun waktu 4 tahun terkahir ini, realisasi penanaman modal asing di Jawa Tengah mengalami fluktuatif, dan kenaikan yang cukup signifikan yaitu pada tahun 2015 dan 2017. Pada periode tersebut PMA Jawa Tengah melampaui target yang telah di tetapkan pemerintah Jawa Tengah, menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Jawa Tengah Prasetyo Ariwibowo, realisasi yang melebihi target itu merupakan sinyal dan apresiasi yang diberikan dunia usaha kepada Jawa Tengah. Dengan peningkatan ini artinya semakin banyak investor yang tertarik untuk masuk di Jawa Tengah. (Antara, 2016)

Mudrajad Kuncoro (2009) dalam bukunya menuliskan bahwa untuk menunjukan kinerja dan potensi suatu negara terhadap PMA dengan melihat berbagai indikator, salah satunya adalah indikator makro ekonomi, *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) sejak tahun 1998 membuat suatu matriks yang dibagi dalam empat bagian, yaitu (1) *Front runner*; yaitu negara dengan kinerja dan potensi PMA yang yang tinggi, (2) *abive potential*; yaitu negara dengan potensi PMA yang rendah namun memiliki kinerja PMA yang tinggi, (3) *below potential*; yaitu negara dengan potensi PMA yang tinggi namun memiliki kinerja

PMA yang rendah, (4) *under performcrs*; yaitu negara dengan potensi dan kinerja PMA yang rendah. Pada periode 2004-2006, Indonesia merupakan negara yang paling lemah dalam pengelolaan PMA, sementara posisi Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam berada pada kategori *front runners*. Oleh Karena itu, untuk mendorong masuknya investasi asing yang lebih besar ke Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa tengah diperlukan penelitian akan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya arus investasi asing di Indonesia. Banyak sekali faktor-faktor yang saling terkait satu sama lainnya dengan pola yang saling berhubungan yang mempengaruhi pertumbuhan investasi asing di Jawa Tengah.

Kegiatan perkonomian tidak lepas dari dukungan pemerintah, salah satunya adalah dengan menyediakan fasilitas dan infrastruktur bagi para penanam modal. Dengan adanya infrastruktur yang memadai diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap penanaman modal di daerah. Dengan meningkatnya kondisi jalan yang tergolong baik diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investor untuk menanamkan modalnya di Jawa Tengah karena dalam kegiatan perekonomian adalah salah satu faktor penting. Menurut Mankiw (2004:57),"pekerja akan lebih produktif jika mereka mempunyai alat-alat untuk bekerja.Peralatan dan infrastruktur yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa disebut modal fisik". Hal yang sama juga dikemukakan Todaro (2000:143) bahwa "tingkat ketersediaan infrastruktur di suatu Negara adalah faktor penting dan menentukaan bagi tingkat kecepatan perluasan pembangunan ekonomi".

Prasarana atau infrastruktur merupakan hal penting yang diperlukan untuk melancarkan kegiatain usaha ekonomi. Misalnya jalan, listrik, telepon, dan lainlain

akan memperlancar proses produksi oleh karena itu tersedianya prasarana dianggap bagian yang ikut menentukan daya tarik investor semakin berminat untuk menanamkan modalnya. Semakin banyak ketersediaan prasarana akan lebih meningkatkan mobilitas investasi dan ekonomi didaerah yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Indonesia salah satu negara yang menganut sistem perekonomian terbuka. Investasi asing langsung tidak ditentukan hanya oleh tingkat bunga yang berasal dari domestik, namun juga dari faktor tingkat suku bunga lain penentu dari luar negeri, yaitu suku bunga internasional (LIBOR) juga mempengaruhi. LIBOR merupakan indikator moneter internasional yang mempengaruhi perkembangan suku bunga di kawasan Indonesia dan berbagai negara lainnya (Masni, 2011:87). Pengusaha akan lebih terdorong untuk melakukan investasi, apabila tingkat suku bunga semakin rendah, sebab biaya penggunaan dana menjadi semakin kecil (Liliana, 2012:37).

Biaya tenaga kerja merupakan salah satu komponen dalam faktor produksi. Perlu diingat bahwa Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar walaupun belum semuanya merupakan tenaga kerja yang sesuai dengan keinginan industri. Satu hal lain yang menjadikan negara-negara investor untuk merelokasi investasinya adalah biaya tenaga kerja yang murah.

Faktor lain yang mempengaruhi masuknya PMA di Indonesia adalah inflasi. Tingkat inflasi yang tinggi akan memberikan pengaruh negatif yaitu menurunnya produksi dan juga menurunnya permintaan barang karna harga yang semakin tinggi.

Hal ini akan mempengaruhi kegiatan investasi dalam suatu Negara, karena akan menurunkan minat investor akibat biaya investasi yang semakin meningkat.

LANDASAN TEORI

1. Investasi

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 1994).

Salim dan Budi (2008) mengemukakan, yang diartikan dengan investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Secara umum investasi meliputi pertambahan barang-barang dan jasa dalam masyarakat seperti pertambahan mesin-mesin baru, pembuatan jalan baru, pembukaan tanah baru, dan sebagainya.

Dalam praktiknya, dalam usaha untuk mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam suatu tahun tertentu, yang digolongkan sebagai investasi (atau pembentukan modal atau penanaman modal) meliputi pengeluaran- pengeluaran yang berikut :

1. Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan.
2. Pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik dan bangunan-bangunan lainnya.

3. Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun penghitungan pendapatan nasional.

Jumlah dari ketiga jenis komponen investasi tersebut dinamakan investasi bruto, yaitu yang meliputi investasi untuk menambah kemampuan memproduksi dalam perekonomian dan mengganti barang modal yang telah didepresiasikan. Apabila investasi bruto dikurangi oleh nilai depresiasi maka akan didapat investasi neto.

2. Inflasi

Inflasi merupakan kecenderungan kenaikan tingkat harga secara terus menerus, mempengaruhi individu-individu, bisnis, dan pemerintah (Latumaerisa, 2012). Inflasi terjadi bila kenaikan tersebut meluas pada sebagian besar barang dan jasa dalam perekonomian, dan jika hal tersebut berlangsung secara terus menerus.

Tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan barang dan jasa menjadi kurang kompetitif yang menyebabkan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan akan menurun, pada akhirnya akan menghambat investasi baru. Oleh sebab itu dalam penelitiannya, Letarisky (2014) mengungkapkan bahwa semakin tinggi tingkat inflasi akan mengakibatkan menurunnya jumlah Penanaman Modal Asing Langsung yang masuk ke Indonesia.

3. Infrastruktur

Grigg(2000) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonom. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai

suatu system, Dimana infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan system ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Dengan infrastruktur yang memadai, efisiensi yang dicapai oleh dunia usaha akan makin besar dan investasi yang didapat semakin meningkat.

Todaro (2000) menjelaskan bahwa tingkat ketersediaan infrastruktur di suatu negara adalah faktor penting dan menentukan bagi tingkat kecepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang pesat akan berakibat pada meningkatnya kebutuhan prasarana dan sarana social ekonomi.

4. Libor

LIBOR (London Inter Bank Offering Rate) merupakan suku bunga internasional yang digunakan sebagai suku bunga perkiraan antar bank di negara yang berbeda. Suku bunga ini memiliki jangka waktu antara 1, 3, 6 bulan dan 1 tahun. Pergerakan tingkat suku bunga ini sesuai gejolak pasar uang dan kondisi ekonomi dunia. LIBOR merupakan suku bunga internasional yang digunakan oleh bank-bank di dunia dan jenis surat atau jenis tabungan didominasi oleh mata uang asing dalam bentuk US$ (Masni, 2009).

Menurut Sukirno (2002) dalam bukunya, kegiatan investasi akan dilakukan oleh para investor sesuai dan sejalan dengan teori-teori yang ada seperti teori klasik dan keynes yang dalam teorinya menyatakan apabila tingkat suku bunga lebih besar dari

tingkat pengembalian modal, investasi yang direncanakan tidak menguntungkan, oleh sebab itu investasi tidak akan dilakukan oleh investor.

5. Upah Pekerja

Pengertian upah secara umum adalah pembayaran yang diperoleh tenaga kerja sebagai bentuk balas jasa yang disediakan dan diberikan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Menurut peraturan pemerintah no 8 Tahun 1981, upah dapat diartikan suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, yang dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan berdasarkan suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya.

Mengenai upah pekerja, Sukirno (2013) menyatakan bahwa dalam teori ekonomi upah diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Upah dibedakan menjadi upah uang dan upah rill. Upah uang adalah jumlah uang yang diterima para pekerja dan para pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental maupun tenaga fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Sedangkan upah rill adalah tingkat upah para pekerja di ukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja.

METODE ANALISIS

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data

tersebut merupakan data yang dikumpulkan dan diolah oleh lembaga atau instansi yang menerbitkan dan menggunakannya, seperi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu metode untuk memperoleh data, catatan, atau dokumen tertulis, yang dikumpulkan dalam bentuk arsip yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data mengenai realisasi Penanaman Modal Asing di Jawa Tengah, Inflasi, Libor, Infrastruktur, Upah Minimum Provinsi, dan Inflasi pada tahun 2000-2016.

Berikut adalah model estimasi Penanaman Modal Asing jangka panjang dalam bentuk persamaan yang digunakan dalam penelitian ini :

$$PMA = \boldsymbol{\alpha_0} + \boldsymbol{\alpha_1 INFR} + \boldsymbol{\alpha_2 LBR} + \boldsymbol{\alpha_3 UMP} + \boldsymbol{\alpha_4 INF} + \boldsymbol{u_t}\ldots$$

Keterangan :

PMA = Penanaman Modal Asing

INFR = Infrastruktur

LBR = Suku Bunga Internasional (LIBOR)

UMP = Upah Minimum Provinsi

INF = Inflasi

Sedangkan estimasi jangka panjang pendek Penanaman Modal Asing dengan menggunakan persaman ECM dalam penelitian sebagai berikut :

$$\Delta PMA = \beta_0 + \beta_1 \Delta INFR + \beta_2 \Delta LBR + \beta_3 \Delta UMP + \beta_4 \Delta INF + \beta_5 ECT + u_t \ldots\ldots$$

Keterangan :

ΔPMA = Perubahan Penanaman Modal Asing

ΔINFR = Perubahan Infrastruktur

ΔLBR = Perubahan Suku Bunga Internasional (LABOR)

ΔUMP = Perubahan Upah Minimum Provinsi

ΔINF = Perubahan Inflasi

Δ(Delta) = Diffrence

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian yang telah dibuat, seluruh data menggunakan data analisis data sekunder deret waktu(time series) yang di mulai pada tahun 2000-2017.

Model yang digunakan dalam penelitian adalah ECM. Dalam model ECM dapat melihat jangka panjang dan jangka pendek yang akan mempengaruhi penanaman modal asing terhadap infrastruktur, inflasi, suku bunga internasional, dan upah pekerja. Untuk mengetahui ada beberapa model tahapan uji yamg diperlukan,diantaranya sebagai berikut :

Uji Stasioneritas

Pada tahap ini merupakan syarat pertama dalam metode ECM yaitu menguji akar-akar unit yang bertujuan untuk mengetahui derajat integrasi data yang digunakan adalah uji akar unit root test yang dikembangkan oleh Dickey-Fuller. Untuk mengregres uji akar unit root ini syaratnya, jika nilai t-statistik > pada nilai tertera critical value maka dapat menolak H0 adanya akar unit, sehingga data yang telah diregres dan diamati dianggap stasioner. Begitu juga sebaliknya jika t-statistik < dari critical value maka menerima H0 yang dianggap tidak stasioner datanya, lalu bila data tidak stasioner maka data tersebut bisa dilakuakan uji akar unit (unit root test) ketika data tersebut dideferensialkan.

Hasil Pengujian Akar Unit

ADF Statistik	T-statistik Level Data	T-statistik *First-difference*	*Critical Value (α=5%)* Level Data	*Critical Value (α=5%)* First-diffrence
PMA	-2.564531	-5.938368	-3.052169	-3.065585
INFRASTRUKTUR	-2.385892	-4.055730	-3.052169	-3.119910
LIBOR	-2.489859	-4.524866	-3.052169	-3.081002
UMP	-0.925544	-8.658766	-3.065585	-3.065585
INFLASI	-5.279030	-4.935773	-3.065585	-3.119910

Sumber : Hasil Olahan Eviews

Keterangan :

*=Variable signifikan pada 5%

Berdasarkan hasil yang telah diolah eviews dalam pengujian akar unit root test variabel PMA, INFRASTRUKTUR, LIBOR, dan UMP tidak stasioner pada tingkat level, dan hanya Variabel INFLASI yang stasioner pada tingkat level. Sedangkan pada tingkat first difference (level 1) semua variabel di nilai stasioner. Dengan demikian data tersebut bisa dilanjutkan kembali pada uji kointegrasi.

Uji Kointegrasi

Dalam uji kointegrasi ini, dapat mengetahui bahwa adanya hubunga jangka panjang antar variabel. Jika adanya kointegrasi, maka data tersebut memeliki analisis jangka panjangnya. Jika tidak memiliki kointegrasi maka data tersebut tidak memiliki jangka panjang dan tidak perlu dicari jangka panjangnya.

Kointegrasi antar variabel tersebut dapat dilihat dengan cara membandingkan nilai nilai kristis dengan nilai trace statisticnya. Jika nilai kritis (α=1%, 5%, 10%)

< nilai trace statisticnya maka dapat disimpulkan terdapat kointegrasi antar variabel. Apabila Jika tidak ada kointegrasi dalam data, jika nilai kritis > nilai trace statistiknya. Berikut hasil kointegrasi yang telah diolah dalam penelitian ini :

Hasil Uji Kointegrasi

Date: 08/24/18 Time: 08:17
Sample (adjusted): 2000 2017
Included observations: 18 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: PMA INFLASI INFRASTRUKTUR LIBOR UMP
Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.981528	132.6227	69.81889	0.0000
At most 1 *	0.888669	68.75840	47.85613	0.0002
At most 2 *	0.732643	33.63446	29.79707	0.0172
At most 3	0.496002	12.52771	15.49471	0.1333
At most 4	0.093169	1.564790	3.841466	0.2110

Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Sumber: Hasil Olahan Eviews 8

Berdasarkan hasil olahan data eviews diatas bahwa hasil kointegrasi tersebut terdapat kointegrasi, yang artinya jika terdapat kointegrasi, maka data tersebut bisa dianalisis jangka panjangnya. Model selanjutnya adalah ECM.

Error Corection Model (ECM)

Setelah melakukan berbagai tahapan yang telah diuji ke tahap-tahap berikut, lalu telah sampailah ke tahap metode ECM. Berikut ada model estimasi jangka panjang dan jangka pendek yang telah dijabarkan persamaannya. Berikut analisis hasil regresinya :

Hasil Regresi Jangka Panjang

Dependent Variable: LOG(PMA)
Method: Least Squares
Date: 09/20/18 Time: 11:38
Sample: 2000 2017
Included observations: 18

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.072367	4.902421	1.646608	0.1236
INFLASI	21.67916	12.72119	1.704178	0.1121
LOG(INFRASTRUKTUR)	0.807291	0.554610	1.455600	0.1692
LIBOR	-0.989351	0.302207	-3.273755	0.0060
LOG(UMP)	-1.100652	0.326798	-3.367993	0.0050

R-squared	0.837039	Mean dependent var	8.002553
Adjusted R-squared	0.786897	S.D. dependent var	4.102872
S.E. of regression	1.894011	Akaike info criterion	4.345404
Sum squared resid	46.63462	Schwarz criterion	4.592729
Log likelihood	-34.10864	Hannan-Quinn criter.	4.379507
F-statistic	16.69343	Durbin-Watson stat	2.007551
Prob(F-statistic)	0.000049		

Sumber: Hasil Olahan Eviews 8

Berdasarkan tabel jangka panjang diatas, diketahui bahwa nilai prob(F-statistic) atau yang dikenal dengan nama uji F sebesar 0.000049 bisa diartikan bahwa nilai f statistic berada dibawah dibandingkan nilai α = 5%, dan secara statistik dikatakan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Inflasi, Infrastruktur, Libor, dan UMP berpengaruh terhadap PMA secara bersama-sama.

Sedangkan uji t tersebut pada variabel inflasi t-statistiknya sebesar 1.704178 berarti harus mencari t-kritisnya dengan menggunakan α=5% dan df=13 sebesar 1.77093 (dilihat dari nilai t-tabel). Sehingga t-hitung < dibandingkan nilai t-tabelnya, yang berarti dalam jangka panjang inflasi tidak signifikan dan berpengaruh positif terhadap PMA.

Sedangkan uji t tersebut pada variabel infrastruktur t-statistiknya sebesar 1.455600 berarti harus mencari t-kritisnya dengan menggunakan α=5% dan df=13

sebesar 1.77093(dilihat dari nilai t-tabel). Sehingga t-hitung < dibandingkan nilai t-tabelnya, yang berarti dalam jangka panjang infrastruktur tidak signifikan dan berpengaruh positif terhadap PMA.

Sedangkan uji t tersebut pada variabel libor t-statistiknya sebesar -3.273755 berarti harus mencari t-kritisnya dengan menggunakan α=5% dan df=13 sebesar 1.77093 (dilihat dari nilai t-tabel). Sehingga t-hitung > dibandingkan nilai t-tabelnya, yang berarti dalam jangka panjang Libor signifikan dan berpengaruh negatif terhadap PMA.

Sedangkan uji t tersebut pada variabel UMP t-statistiknya sebesar -3.367993 berarti harus mencari t-kritisnya dengan menggunakan α=5% dan df=13 sebesar 1.77093 (dilihat dari nilai t-tabel). Sehingga t-hitung > dibandingkan nilai t-tabelnya, yang berarti dalam jangka panjang UMP signifikan dan berpengaruh negatif terhadap PMA.

Hasil regresi jangka panjang dapat diperoleh dari nilai (R^2) dikali 100%. Nilai R^2 0.837039 dikali 100% yang hasilnya 83,70% (dijelaskan pada inflasi, infrastruktur, libor, UMP) sedangkan sisanya sebesar 16,30 % dijelaskan oleh variabel lain.

Hasil Regresi Jangka Pendek

Dependent Variable: D(LOG(PMA))
Method: Least Squares
Date: 04/07/18 Time: 17:30
Sample (adjusted): 2001 2017
Included observations: 17 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.138563	0.536521	0.258262	0.8020
D(INFLASI)	-1.538169	0.565179	-2.721560	0.0235
D(LOG(INFRASTRUKTUR))	0.001559	0.000558	2.794427	0.0209
D(LIBOR)	-3.497500	1.315296	-2.659097	0.0261
D(LOG(UMP))	-0.001823	0.002755	-0.661803	0.5247
ECT(-1)	-0.548175	0.270494	-2.026568	0.0733

R-squared	0.806272	Mean dependent var	-0.130899
Adjusted R-squared	0.698646	S.D. dependent var	3.574027
S.E. of regression	1.961989	Akaike info criterion	4.474969
Sum squared resid	34.64460	Schwarz criterion	4.758189
Log likelihood	-27.56227	Hannan-Quinn criter.	4.471952
F-statistic	7.491389	Durbin-Watson stat	2.976771
Prob(F-statistic)	0.004954		

Sumber: Hasil Olahan Eviews 8

Berdasarkan hasil regresi diatas, bisa dilihat dan diamati bahwa nilai koefisien ECT sebesar -0.548175 kalau dilihat dari taraf signifikansi, hasil regres ECT dari nilai prob ECT sebesar 0.0733 yang artinya bahwa variabel ini bisa dibilang signifikan dari taraf signifikansi α=10%. Dengan demikian bisa disimpulkan, ternyata model ECM tersebut adalah cocok dan tepat dalam penelitian ini. Oleh karenanya pengujian ECM dikatakan sahih atau valid.

Berdasarkan tabel jangka pendek diatas, diketahui bahwa nilai prob(F-statistic) atau yang dikenal dengan nama uji F sebesar 0.004954 Bisa diartikan bahwa nilai f statistic berada dibawah dibandingkan nilai α = 5%, dan secara statistik dikatakan

signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Inflasi, Infrastruktur, Libor, dan UMP berpengaruh terhadap PMA secara bersama-sama.

Pada uji t variabel D (inflasi) t-statistiknya sebesar -2.721560 berarti harus mencari t-kritisnya dengan menggunakan α=5% dan df=12 sebesar 1.78229 (dilihat dari nilai t-tabel). Sehingga t-hitung > dibandingkan nilai t-tabelnya, yang berarti dalam jangka pendek inflasi signifikan dan berpengaruh negatif terhadap PMA.

Pada uji t variabel D (infrastruktur) t-statistiknya sebesar 2.794427 berarti harus mencari t-kritisnya dengan menggunakan α=5% dan df=12 sebesar 1.78229 (dilihat dari nilai t-tabel). Sehingga t-hitung > dibandingkan nilai t-tabelnya, yang berarti dalam jangka pendek infrastruktur signifikan dan berpengaruh positif terhadap PMA.

Pada uji t variabel D (Libor) t-statistiknya sebesar -2.659097 berarti harus mencari t-kritisnya dengan menggunakan α=5% dan df=12 sebesar 1.78229 (dilihat dari nilai t-tabel). Sehingga t-hitung > dibandingkan nilai t-tabelnya, yang berarti dalam jangka pendek libor signifikan dan berpengaruh negatif terhadap PMA.

Pada uji t variabel D (UMP) t-statistiknya sebesar -0.661803 berarti harus mencari t-kritisnya dengan menggunakan α=5% dan df=12 sebesar 1.78229 (dilihat dari nilai t-tabel). Sehingga t-hitung < dibandingkan nilai t-tabelnya, yang berarti dalam jangka pendek UMP tidak signifikan dan berpengaruh negatif terhadap PMA.

Hasil estimasi regresi jangka pendek dapat diperoleh dari nilai (R^2) dikali 100%. Nilai R^2 0.806272 dikali 100% yang hasilnya 80,62% (dijelaskan pada

inflasi, infrastruktur, libor, UMP) sedangkan sisanya sebesar 19.38 % dijelaskan oleh variabel lain.

ANALISIS EKONOMI

Dalam jangka panjang, hasil analisis menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap penanaman modal asing, hal ini tentunya bertolak belakang dengan teori yang yang dikemukakan oleh Sukirno (2005:381), Inflasi memberikan dampak negatif terhadap kegiatan investasi berupa biaya investasi yang tinggi. Perbedaan hasil ini bisa terjadi karena penanaman modal asing jangka panjang tidak menjadikan inflasi sebagai tolak ukur yang mempengaruhi keputusan investor asing dalam menanamkan modalnya, karena berdasarkan kejadian lapangan penanaman modal asing bertolak ukur pada potensi suatu negara dalam kegiatan perekonomiannya seperti diantaranya pertumbuhan ekonomi dari pertumbuhan output dan tingkat suku bunga.

Sedangkan dalam jangka pendek terdapat hubungan negatif dan signifikan pada inflasi, dimana apabila terjadi peningkatan inflasi 1 (satu) persen maka penaman modal asing akan menurun sebesar 1.538169 persen. Hal ini membuktikan bahwa perubahan tingkat inflasi dalam jangka pendek di Jawa Tengah berpengaruh secara langsung terhadap banyaknya investasi PMA yang masuk ke daerah Jawa Tengah. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sukirno (2005:381), inflasi memberikan dampak negatif terhadap kegiatan investasi berupa biaya investasi yang tinggi. Tingginya Inflasi akan menurunkan minat investor dalam menanamkan modalnya akibat biaya investasi yang tinggi, sebaliknya jika inflasi rendah maka biaya investasi akan lebih murah dan akan

meningkatkan investasi asing masuk untuk menanamkan modalnya. Akibat dari tingginya inflasi juga akan membuat tingkat konsumsi masyarakat menurun, karena disebabkan oleh kemampuan masyarakat dalam membeli barang akan menurun akibat dari harga yang melambung tinggi.

Dalam jangka panjang hasil analisis menunjukan infrastruktur tidak signifikan terhadap PMA. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Faisal dkk (2013) Hal ini bisa disebabkan karena para investor asing dalam kegiatan pendistribusian tidak begitu melihat faktor kondisi jalan atau panjang jalan yang ada di Jawa Tengah, hal ini juga bisa terjadi karena para investor asing lebih memilih menggunakan transportasi udara atau laut yang lebih aman dan cepat. Seiring dengan adanya pembangunan dan perbaikan jalan maka ini bisa diikuti dengan biaya pajak yang tinggi pula sehingga para investor asing menghindari pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga.

Sedangkan dalam jangka pendek terdapat hubungan positif dan signifikan pada infrastruktur terhadap PMA, dimana apabila terjadi peningkatan infrastruktur setiap 1 (satu) persen maka penanaman modal asing akan meningkat sebesar 0.001559 Ribu USD. Hal ini pun serupa sebagaimana yang dinyatakan oleh Faisal, Sri Marhaeni dkk (2013), dengan infrastruktur yang memadai, efisiensi yang dicapai oleh dunia usaha akan semakin besar dan investasi yang didapat semakin meningkat. Hal ini pun bisa disebabkan karena para investor asing melihat perkembangan infrastruktur Jawa Tengah diikuti dengan kegiatan pendistribusian barang yang dekat dengan konsumen, sehingga tidak menyebabkan adanya hambatan-hambatan yang dapat merugikan para investor. Jika kondisi infrastruktur

di lingkungan sekitar perusahaannya baik seperti kondisi dan pembangunan jalannya baik maka dapat meningkatkan pendapatan.

Dalam jangka panjang maupun jangka pendek terdapat hubungan negatif dan signifikan pada Libor terhadap PMA, dimana dalam jangka panjang apabila terjadi peningkatan Libor setiap 1 (satu) persen maka penanaman modal asing akan menurun sebesar 0.989351 persen, dan dalam jangka pendek apabila terjadi peningkatan Libor setiap 1 (satu) persen maka penanaman modal asing akan menurun sebesar 3.497500 persen. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Keynes bahwa pengaruh suku bunga dengan investasi berbanding terbalik. Hal ini bisa terjadi karena perubahan suku bunga bank dunia dapat mempengaruhi keinginan investor asing untuk melakukan investasi di bank pada negara berkembang, sehingga dapat berpengaruh terhadap banyaknya investasi penanaman modal asing di Jawa Tengah.

Dalam jangka panjang terdapat hubungan negatif dan signifikan pada Upah Minimum Provinsi (UMP), dimana apabila terjadi peningkatan UMP setiap 1 (satu) persen maka penanaman modal asing akan menurun sebesar 1.100652 ribu rupiah. Artinya jika upah pekerja di Jawa Tengah tinggi maka akan menyebabkan turunnya minat investor asing untuk menanamkan modalnya di jawa tengah karena akan meningkatkan biaya produksi. Hal ini juga dijelaskan oleh Faisal dkk (2013) bahwa bila kenaikan biaya produksi tidak diimbangi dengan tingkat produktivitas pekerja maka keuntungan perusahaan akan berkurang.

Sedangkan dalam jangka pendek UMP tidak signifikan terhadap PMA. Hal ini disebabkan karena upah minimum provinsi tidak dapat terlalu dilihat pengaruhnya

terhadap penanaman modal asing karena memang pada kejadian lapangan yang sering ditemui di Negara Indonesia kenaikan upah minimum provinsi mengalami kenaikan setiap satu tahun sekali. Sehingga pengaruh perubahan UMP akan terlihat pada jangka panjang.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Pada akhirnya telah sampai di bab kesimpulan yang menyimpulkan penelitian ini berdasarkan dari rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis yang telah dibuat, analisis data dan hasil pembahasan yang telah dipaparkan, maka telah dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam jangka panjang inflasi memiliki nilai koefisien yang positif namun tidak berpengaruh terhadap penanaman modal asing. Sedangkan dalam jangka pendek terdapat hubungan negatif dan signifikan pada inflasi.
2. Dalam jangka panjang infrastruktur memiliki koefisien yang positif namun tidak berpengaruh terhadap penanaman modal asing. Sedangkan dalam jangka pendek terdapat hubungan positif dan signifikan pada infrastruktur terhadap penanaman modal asing.
3. Dalam jangka panjang maupun jangka pendek terdapat hubungan negatif dan signifikan pada Libor terhadap penanaman modal asing.
4. Dalam jangka panjang terdapat hubungan negatif dan signifikan pada Upah Minimum Provinsi(UMP) terhadap penanaman modal asing. Sedangkan dalam jangka pendek UMP memiliki nilai koefisien negatif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap penanaman modal asing.

Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis maka penulis merumuskan beberapa implikasi yang dirasa perlu untuk menjadi pertimbangan kedepannya yang diantaranya:

1. Perlu adanya penekanan inflasi pada jangka pendek mengingat inflasi berpengaruh negatif kepada penanaman modal asing dalam jangka pendek. Hal ini bisa dilakukan dengan cara peningkatan output produksi. Dikarenakan daerah jawa tengah merupakan daerah industri dengan daya beli pendudukan lokal yang lemah.
2. Perlu adanya peningkatan infrastruktur pada jangka pendek mengingat infrastruktur berpengaruh positif pada penanaman modal asing dalam jangka pendek. Hal ini bisa dilakukan dengan perbaikan dan penambahan jalan guna lebih mempercepat laju transaksi perdagangan sektor yang dengan demikian transaksi barang rill akan lebih efisien dalam waktu perjalanannya. Dengan semakin lebih baiknya laju transaksi perdagangan di Jawa Tengah maka akan menarik minat investor asing untuk melakukan penanaman modal.
3. Dalam jangka panjang maupun jangka pendek suku bunga Libor berpengaruh negatif terhadap penanaman modal asing. Dengan demikian pemerintah melalui Bank Indonesia dapat melakukan suatu kebijakan untuk mengantisipasi tingkat suku bunga Libor yang tinggi, yaitu dengan cara menurunkan tingkat suku bunga kreditnya agar produsen lokal dapat melakukan investasi guna meningkatkan total output produksi sehingga

akan menjadi faktor daya tarik terhadap minat investor asing dalam penanaman modal asing. Jadi tanpa harus mengikuti tingkat suku bunga Libor yang tinggi cara tersebut bisa menjadi pilihan alternatif.

4. Upah minimum provinsi berpengaruh negatif pada penanaman modal asing dalam jangka panjang. Dengan demikian perlu adanya pengkordinasian yang baik antara serikat pekerja dengan pihak industri, agar pihak industri dapat lebih mengalokasikan antara pengeluaran untuk upah dan pengeluaran dividen yang menjadi faktor utama ketertarikan investor asing. Dengan demikian harus adanya dukungan dari pemerintah dengan suatu regulasi yang dibuat agar keinginan buruh dalam menaikan upah lebih terkontrol.

DAFTAR PUSTAKA

Faisal Haris Pratama, Sri Marhaeni Salsiyah, Sri Wahyuni. (2013). " Analisis Pengaruh Angkatan Kerja, Upah Karyawan Domestik, Dan Infrastruktur terhadap Penanaman Modal Asing Di Jawa Tengah Melalui BAdan Penanaman Modal Daerah(BPMD) Provinsi Jawa Tengah (Periode 2000-2013)". Jurnal. Semarang: Politeknik Negeri Semarang

Grigg, Neil, & Fontane G. Darrel. (2000). Infrastructure System Management & Optimization. Internasional Seminar. Paradigm & Strategy of Infrastructure Management. Sesmarang: Universitas Diponegoro.

Hadhikusuma, R.T Sutantya R dan Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Perusahaan Yang Berlaku Di Indonesia Cetakan ke 3, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995.

Kuncoro, Mudrajad, (2009). Ekonomi Indonesia. Yogyakarta : UPP STIM YKPN Yogyakarta

Latumaerissa, Julius R. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*.Jilid 1. Jakarta : Salemba Empat.

Letarisky, (2014). "Pengaruh Indikator Fundamental Makroekonomi Terhadap Foreign Direct Investment Di Indonesia (Periode Tahun 2004-2013)".Jurnal. Vol 15, No 2. Liliana, (2012). Usaha

Penanaman Modal di Indonesia, Edisi Pertama. Jakarta: Rajawali Pers. Mankiw, Gregory, (2003). Teori Makro ekonomi, Edisi Kelima. Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama.

Murwani, Sri, (2007). "Analisis Kebijakan Moneter Kaitannya dengan Penanaman Modal Asing Pendekatan Taylor Rule".Tesis tidak dipublikasikan, Universitas Diponegoro.

Sadono Sukirno, (1996). Pengantar Teori Makro Ekonomi. Edisi ke 5, Jakarta :Rajawali Pers.

Sadono Sukirno, (2000). Makro Ekonomi Modern. Edisi ke 1, Jakarta : Raja Grafindo.

Sadono Sukirno. (2005) . Pengantar Teori Ekonomi Makro . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Sarwedi. (2002). Investasi Asing Langsung Di Indonesia Dan Faktor Yang Mempengaruhinya. Dalam Jurnal Akuntansi & Keuangan, Vol. 4, No. 1. Jember:Universitas Kristen Petra

Salim, Budi Sutrisno. (2008). Hukum Investasi di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers

Sidabalok, Masni. (2009). "Analisis Pengaruh Suku Bunga Internasional, Kurs dan Inflasi terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia". Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Tambunan, Tulus, (2005). Perekonomian Indonesia Teori dan Temuan Empiris. Jakarta : Gahlia Indonesia.

Todaro, M.P. (2000). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta:Erlangga

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Widiastuti, Aris Wasita (2017, 27 Januari), Realisasi Investasi Jawa Tengah 2016 Lampaui Target. Antara , halaman 1. Tersedia : https://www.antaranews.com